

Paris, le 20 janvier 2025

NOTE DES AUTORITES FRANCAISES

Objet : propositions de mesures pour l'agenda européen de simplification réglementaire et administrative

Selon M. Draghi, l'Union européenne perd actuellement 10% de son potentiel de PIB en raison de la complexité réglementaire pesant sur les entreprises, les charges supplémentaires dues aux mesures nationales additionnelles, la « sur-réglementation » (*gold-plating*) de la législation européenne et les exigences et normes de mise en œuvre divergentes entre les États membres.

Un puissant moyen de parvenir à améliorer la compétitivité des entreprises européennes est de simplifier et d'accélérer les procédures administratives pour favoriser les projets d'investissement dans l'UE et pour créer un environnement réglementaire simple et prévisible, en particulier pour les PME et entreprises de taille intermédiaire.

Il est désormais crucial de transformer les annonces de la Commission européenne en actions ambitieuses et effectives pour répondre à ce défi. Les autorités françaises plaident donc pour un nouvel agenda de simplification très ambitieux qui devrait intervenir dès le début de la mandature pour envoyer un signal positif aux entreprises européennes.

Un tel agenda de simplification doit s'appuyer tout d'abord sur **une pause réglementaire massive**, et donc sur un réexamen des législations en cours de négociation, issues de la précédente mandature, et qui pourraient ne plus être en phase avec le Programme stratégique

Gambar 3. 6. Surat oleh Otoritas Prancis kepada UE

Sumber: (French Authorities, 2025)

Beberapa simplifikasi tersebut di antaranya adalah modifikasi terhadap dua direktif industri UE yaitu CSRD dan CS3D. Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CS3D) 2024/1760 mewajibkan perusahaan besar UE dan non-UE mengidentifikasi dampak lingkungan dan HAM dari kegiatan operasional dan rantai pasok mereka (European Union, n.d.-b). Prancis mendukung implementasi

direktif tersebut namun di saat bersamaan juga menilai kewajiban yang terdapat dalam CS3D menciptakan potensi resiko produktivitas pada beberapa perusahaan. Oleh karenanya, Prancis menilai perlu dilakukan redefinisi terhadap ‘perusahaan besar’. Prancis merekomendasikan definisi perusahaan besar sebagai perusahaan dengan kapasitas 5000 pekerja dan keuntungan kotor lebih dari 1.5 juta euro pada skala global untuk perusahaan UE dan keuntungan lebih dari 1.5 juta euro di pasar Eropa bagi perusahaan non-UE (French Authorities, 2025). Hal ini jauh lebih tinggi dibanding bentuk awal dengan kapasitas perusahaan sebanyak 1000 pekerja dan keuntungan kotor di atas 450 juta euro. Selanjutnya Prancis juga merekomendasikan modifikasi terhadap direktif 2022/2464 terkait keberlanjutan perusahaan (CSRD). Direktif ini mengatur tersedianya informasi atau laporan terkait kegiatan perusahaan yang dapat diakses oleh publik. Namun, Prancis menilai masalah kompetitivitas yang saat ini dimiliki oleh perusahaan UE membuat kerangka ini tidak lagi proporsional.

Prancis juga merekomendasikan penyederhanaan regulasi relatif pada sektor agrikultur. Dalam konteks pasca demonstrasi 2024, Komisi Eropa sebenarnya sudah melakukan simplifikasi regulasi pada Mei 2024 (European Commission, 2024). Otoritas Prancis merekomendasikan simplifikasi lebih lanjut dalam administrasi persyaratan pembiayaan oleh kebijakan UE seperti Common Agricultural Policy (CAP) dan regulasi 2022/2047 terkait pendanaan sektor agrikultur dan kehutanan serta area rural (French Authorities, 2025).

Surat Otoritas Prancis kepada Komisi Eropa menjadi sebuah penyesuaian strategis oleh Prancis terhadap tekanan dari kompetisi industri global dan tekanan variabel intervensi dari dalam negeri. Meski Macron telah secara berulang kali menggunakan istilah ‘jeda regulasi’ dalam pidato-pidatonya, pemerintah Prancis akhirnya secara resmi menggunakan istilah tersebut dalam surat resmi. Secara lebih spesifik, kerumitan administratif dalam implementasi EGD telah menciptakan hambatan yang tidak seimbang bagi Prancis dan negara anggota UE dengan AS dan Cina.

Tuntutan/rekomendasi simplifikasi regulasi ini juga merupakan penyesuaian strategis Macron atas politisasi dinamika demonstrasi agrikultur pada 2024 oleh sayap kanan Prancis. Surat ini membantu Macron menunjukkan bahwa kendali dan penyelesaian isu masih berada di bawah badan eksekutif dan kedaulatan nasional masih berlaku meskipun Prancis merupakan bagian dari integrasi Uni Eropa. Regulasi lingkungan masih bisa dijalankan tanpa mengorbankan sektor-sektor penting negara dengan adanya jeda dan simplifikasi regulasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perubahan sikap Prancis terhadap kebijakan-kebijakan terkait European Green Deal yang termanifestasi dalam bentuk proposal ‘jeda regulasi kepada Uni Eropa merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tekanan sistemik dari stimulasi pada sistem internasional dan dinamika yang terjadi di dalam negeri. Melalui kerangka realisme neoklasik, dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri Prancis tidak hanya ditentukan oleh ancaman pada tingkat global tetapi juga melalui filter dari variabel-variabel domestik yang memengaruhi persepsi dan kapasitas Prancis dalam bertindak terhadap stimulus tersebut.

Secara sistemik, stimulasi yang dihadapi Prancis berbentuk persaingan industri dan ekonomi dengan kekuatan besar dalam hal ini AS dan Cina. Implementasi EGD juga memperparah ketergantungan impor teknologi ramah lingkungan berupa baterai dan panel surya yang belum bisa bersaing dengan produk Cina apabila diproduksi di UE. Tekanan ini dipersepsikan oleh Prancis sebagai ancaman dengan respon kebijakan berupa pengajuan ‘jeda regulasi’ kepada Uni Eropa melalui translasi stimulasi sistemik tersebut menggunakan empat variabel intervensi di level domestik.

Citra atau persepsi pemimpin adalah peta kognisi Presiden Macron sebagai seorang European Sovereignist yang mempersepsikan bahwa keberlanjutan kedaulatan Eropa, dan dengan itu termasuk Prancis, saat ini lebih terancam resiko deindustrialisasi

dibandingkan keterlambatan target-target iklim untuk sementara waktu. Budaya strategis Prancis dengan doktrin gaullisme melihat bahwa dalam memastikan otonomi strategis di masa kini, kekuatan industri nasional harus menjadi prioritas tertinggi dalam memastikan Prancis dan Eropa dapat secara general tetap berdiri sendiri tanpa harus bergantung ke salah satu kekuatan. Hubungan negara-masyarakat berhubungan dengan penurunan kapasitas Prancis mengekstraksi kepatuhan masyarakat terhadap EGD yang ditunjukkan dengan perlawanan sosial berupa demonstrasi dari kelompok industri agrikultur. Terakhir, dalam institusi domestiknya, lembaga eksekutif Prancis memiliki kerentanan institusional akibat hilangnya mayoritas absolut dalam parlemen baik dalam tingkat nasional maupun Eropa. Jeda regulasi menjadi instrument survival untuk meredam narasi oposisi pemerintah bahwa *foreign policy executive*, dalam hal ini presiden, memberlakukan kebijakan lingkungan tanpa konsiderasi beban di sektor industri terutama agrikultur.

Dapat disimpulkan bahwa sabuk transmisi kebijakan luar negeri Prancis mengalami gesekan ketika ambisi regional bertabrakan dengan realitas dalam politik domestik. Proposal jeda regulasi Januari 2025 merupakan bentuk penyesuaian strategis Prancis untuk menyeimbangkan komitmen lingkungan dengan daya saing industri/ekonomi dan stabilitas dalam negeri.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyarankan disertainya mekanisme mitigasi dampak ekonomi domestik serta sosial yang lebih kuat dalam diskursus

kebijakan lingkungan. Hal ini dalam rangka tidak menimbulkan penolakan atau resistensi sosial yang pada akhirnya memperlambat atau melumpuhkan agenda transisi lingkungan. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana implementasi rekomendasi jeda regulasi ini pada tingkat Uni Eropa. Hal ini mengingat umur proposal yang dihitung baru dan perkembangan serta respon UE juga harus mengkonsiderasi adanya negara anggota lain terutama negara industri besar Eropa lain seperti Jerman.